

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 94 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama perlu disesuaikan dengan perubahan indikator kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 37
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA.

Pasal I

Ketentuan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang
sebagaimana diatur dalam angka romawi I lampiran Peraturan Walikota
Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 - 12 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 - 12 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 95

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 94 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MALANG NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG

VISI : Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat				
MISI 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan				
KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7-12 th X100% Penjelasan : siswa SD/MI yang dimaksud adalah seluruh siswa SD/MI tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)	- Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Data Individu Sekolah, Dapodik - Data penduduk usia 7-12 th

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	<p>Jumlah penduduk usia antara 7-12 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 th</p> <p>Penjelasan : Penduduk Kota Malang yang berusia 7-12 tahun yang sekolah di SD/MI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Individu Sekolah,Dapodik - Data penduduk usia 7-12 th
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	<p>Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13-15 th X100%</p> <p>Penjelasan : siswa SMP/MTs yang dimaksud adalah seluruh siswa SMP/MTs tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Individu Sekolah,Dapodik - Data penduduk usia 13-15 th

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	<p>Jumlah penduduk usia antara 13-15 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 th</p> <p>Penjelasan : Penduduk Kota Malang yang berusia 13-15 tahun yang sekolah di SMP/MTs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Individu Sekolah, Dapodik - Data penduduk usia 13-15 th
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16-18 th X100%</p> <p>Penjelasan : siswa SMA/SMK/MA yang dimaksud adalah seluruh siswa SMA/SMK/MA tanpa membedakan usia (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Individu Sekolah, Dapodik - Data penduduk usia 16-18 th

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	<p>Jumlah penduduk usia antara 16-18 th yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 th</p> <p>Penjelasan : Penduduk Kota Malang yang berusia 16-18 tahun yang sekolah di SMA/SMK/MA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Individu Sekolah,Dapodik - Data penduduk usia 16-18 th
	7. Angka Melek Huruf	<p>Jumlah penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis dibagi jumlah penduduk usia 15 th ke atas X 100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar/Data penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis - Data Badan Pusat Statistik - Data kependudukan
	8. Angka Kelulusan	<p>Jumlah kelulusan pada jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK) dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun ajaran berkenaan X 100%</p>	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Data kelulusan setiap jenjang pendidikan - Data siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs	<p>Jumlah anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang sekolah sampai dengan SMP/MTs dibagi jumlah seluruh anak usia sekolah sampai dengan SMP/MTs dari keluarga pra sejahtera X 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan 	Dinas Pendidikan	- Data jumlah siswa SD/MI sampai dengan SMP/MTs yang berasal dari keluarga prasejahtera
Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama X 1.000	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev pelayanan kesehatan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Banyaknya kematian ibu saat hamil, melahirkan dan nifa dibagi jumlah Ibu saat hamil, melahirkan dan nifas X 100.000 KH	Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev pelayanan kesehatan
	3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000 penduduk)	Jumlah tenaga medis X 1.000 dibagi jumlah penduduk Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.	Dinas Kesehatan	- Profil Kesehatan Kota Malang - Data kependudukan
	4. Rasio Posyandu per Satuan Balita	Jumlah posyandu X 1.000 dibagi jumlah balita	Dinas Kesehatan	Hasil monev kegiatan posyandu
	5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis	Jumlah Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dibagi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin X 100% Penjelasan : Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut standar kriteria BPS	Dinas Kesehatan	- Data Badan Pusat Statistik - Profil Kesehatan Kota Malang - Hasil monev pelayanan kesehatan
	6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan Kota Malang

MISI 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja UKM	1. Persentase koperasi sehat	<p>Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi X 100%</p> <p>Penjelasan : Koperasi sehat adalah koperasi yang mampu memenuhi aspek kesehatan koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 20/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 yang meliputi : aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri koperasi.</p>	Dinas Koperasi dan UKM	Hasil kegiatan money dan pembinaan Koperasi

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB	PDRB UKM dibagi total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan UKM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan dan pariwisata	1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB	PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dibagi total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
	2. Persentase sektor industri pengolahan terhadap total PDRB	PDRB sektor industri pengolahan dibagi total PDRB X 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Perindustria dan Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang menganggur (tidak bekerja) dibagi jumlah Angkatan Kerja keseluruhan (usia 15 – 59 tahun) x 100%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil monev ketenagakerjaan - Profil Kota Malang

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	<p>Jumlah Angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas X 100%</p> <p>Penjelasan : Angkatan kerja 15 tahun ke atas adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja</p>	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	<p>- Hasil monev ketenagakerjaan</p> <p>- Profil Kota Malang</p>
Meningkatnya kinerja penanaman modal dan investasi daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	<p>Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n dikurangi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1 dibagi Jumlah nilai penanaman modal dan investasi tahun n-1</p> <p>Penjelasan : Nilai penanaman modal dan investasi daerah (milyar rupiah) pada tahun berkenaan</p>	Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	Hasil koordinasi dengan BKPM
Meningkatnya ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	Ketersediaan pangan (<i>food availability</i>)	<p>Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun (kg) dibagi jumlah penduduk X 100%</p> <p>Penjelasan : Kriteria pangan meliputi : padi, tebu, ikan, daging dan telur</p>	<p>- Dinas Pertanian</p> <p>- Kantor Ketahanan Pangan</p>	Laporan Hasil Kegiatan monev produk pangan Daerah

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Menurunnya persentase penduduk miskin	Angka kemiskinan Persentase penurunan jumlah penduduk miskin	<p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dibagi jumlah penduduk X 100%</p> <p>Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 dikurangi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n dibagi Jumlah penduduk yang masuk kategori miskin tahun n-1 x 100%</p> <p>Penjelasan : Penduduk miskin adalah penduduk yang memenuhi minimal 9 variabel dari 14 variabel miskin menurut standar kriteria BPS</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Monev Kemiskinan - Data Badan Pusat Statistik

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya perlindungan terhadap penyandang cacat fisik dan mental sert lanjut usia tidak potensial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapatkan penanganan	<p>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yangmendapatkan penanganandibagi jumlah seluruh penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensialX 100%</p> <p>Penjelasan : Yang dimaksud mendapatkan penanganan adalahyang telah diberikan bantuan/pelatihan</p>	Dinas Sosial	Laporan Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial
Meningkatnya perlindungan terhadap korban bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	<p>Jumlah korban bencana yang tertangani dibagi jumlah seluruh korban bencanaX 100%</p> <p>Penjelasan : kriteria tertangani adalah pada korban bencana diberikan bantuan dalam bentuk bantuan relokasi sementara, bantuan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, bantuan bimbingan konseling, rohani dan moral.</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka harapan hidup perempuan ditambah angka melek huruf perempuan dan pendapatan perempuan dibagi 3 (tiga) Penjelasan : Hampir sama dengan IPM namun pada penghitungan Indeks Pembangunan Gender, komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	- Profil Kota Malang/Kota Malang dalam Angka - Data Badan Pusat Statistik
	2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks keterwakilan perempuan diparlemen ditambah indeks pengambilan keputusan ditambah pendapatan perkapita perempuan dibagi 3 (tiga) Penjelasan : Merupakan indeks komposit dari Tiga komponen penyusun yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya layanan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti.	Jumlah kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama x 100% Penjelasan : Ditindaklanjuti adalah dilaksanakan sesuai dengan bunyi kesepakatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Forum Komunikasi Antar Umat Beragama	- Hasil musyawarah Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang
	2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA	Jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 dikurangi jumlah kerusuhan tahun n dibagi jumlah kerusuhan bermotif SARA tahun n-1 x100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Kerusuhan SARA pada Kepolisian
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	1. Persentase penurunan angka kriminalitas	Jumlah kriminalitas tahun n-1 dikurangi jumlah kriminalitas tahun n dibagi jumlah kriminalitas tahun n-1 x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data tindak kriminalitas pada Kepolisian
	2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 dikurangi jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n dibagi jumlah kasus pelanggaran Perda tahun n-1 x 100%	Satuan Polisis Pamong Praja	Data Pelanggaran Perda

MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas infrastruktur, prasarana dan sarana transportasi jalan, serta daya dukung kota dengan berwawasan lingkungan	1. Luasan kawasan kumuh	Jumlah seluruh luasan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 	Hasil monev pencapaian SPM bidang Perumahan
	2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik	<p>Jumlah kumulatifpanjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedangdibagijumlah kumulatifpanjang jalan X 100%</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	Laporan hasil kegiatan pengawasan dan pemeliharaan jalan

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3. Persentase layanan air bersih	Jumlah KK yang mendapat pelayanan air bersih dibagi jumlah seluruh KK X 100%	PDAM	Data KK pengguna air bersih
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya	1. Persentase luasan RTH	Luasan ruang terbuka hijau dibagi luasan wilayah X 100%	- Dinas Kebersihan dan Pertamanan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Data/profil ruang terbuka hijau Kota Malang
	2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah seluruh pelanggaran tata ruang X 100% Penjelasan : Pelanggaran tata ruang yang tertangani yaitu pelanggaran yang sudah ditindak mulai dari surat peringatan sampai dengan proses penyidikan	- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan - Satpol PP	Hasil kegiatan pembinaan OKP
	3. % luasan wilayah yang telah sesuai dengan peruntukannya	Jumlah pemanfaatan ruang yang telah sesuai dg peruntukannya dibagi jumlah seluruh wilayah yang telah dimanfaatkan x 100% Penjelasan : Kriteria sesuai peruntukannya adalah wilayah tersebut telah digunakan/dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai WBK	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi	Inspektorat	Laporan hasil penetapan WBK oleh Kementerian PAN dan RB
	2. Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Malang	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Inspektorat - Bagian Organisasi	Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB
	3. Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	- Inspektorat - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan hasil audit LKD oleh BPK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bagian Organisasi	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019